

LAPORAN TAHUNAN PUSHAM UII

1 Januari - 31 Desember 2005



LAPORAN TAHUNAN **PUSHAM UII**

1 Januari - 31 Desember 2005

LAPORAN TAHUNAN
PUSHAM UII
1 Januari - 31 Desember 2005

Februari 2006

Penyusun

Eko Riyadi
Laode Arham

Penterjemah

Nova Umiyati
Anita Kusuma Dewi

Layout

Tarkima

Foto Dok.

PUSHAM UII

Jl. Kusumanegara No. 218 Yogyakarta 55165
Telp. (0274) 375 006 Fax. (0274) 373 572
website: <http://www.pushamuii.org>
e-mail: pushamuii@yahoo.com

Sambutan



Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) telah memasuki usia 5 tahun. Masa yang masih muda untuk ukuran lembaga studi di bawah naungan Perguruan Tinggi namun juga waktu yang relatif cukup untuk memunculkan karya monumental bagi perkembangan kehidupan bermasyarakat yang demokratis, berpendidikan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Ada dua jalur besar yang digunakan oleh PUSHAM UII untuk mewujudkan misinya yaitu jalur pendidikan dan jalur birokrasi pemerintahan.

Pendidikan kami anggap sebagai pilar utama untuk dapat memajukan kehidupan bangsa, selain itu pendidikan merupakan sarana paling efektif bagi penyebaran nilai-nilai HAM kepada masyarakat. Mata rantai penyebaran nilai-nilai HAM dapat dengan mudah tersambung dengan menggunakan sarana pendidikan, terutama pendidikan formal. Dosen dan guru merupakan aktor yang efektif yang dapat menyampaikan nilai-nilai HAM kepada anak didiknya. Oleh karena itu PUSHAM UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo Norwegia telah melaksanakan sebuah program besar yaitu Penyusunan Kurikulum Mata Kuliah Hukum dan HAM bagi Mahasiswa Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi se-Indonesia. Program ini merupakan awal dari serangkaian kerja besar yang akan dilaksanakan setelahnya antara lain pelatihan kepada Staf Pengajar Hukum HAM di berbagai Perguruan Tinggi se-Indonesia, penulisan buku ajar Hukum dan HAM untuk mahasiswa Fakultas Hukum dan penggunaan serta evaluasi terhadap buku tersebut.

Agenda monumental yang lain adalah berdirinya Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bentuk kampanye PUSHAM UII melalui jalur birokrasi. Kampanye tentang pentingnya lembaga ini telah dilakukan sejak tahun 2001 namun baru tahun 2005 aparat pemerintah Propinsi DIY menginisiasi dan kemudian menunjuk PUSHAM UII sebagai lembaga yang mempersiapkan serta memfasilitasi pendirian lembaga tersebut dan akhirnya pada tanggal 8 Juni 2005 Lembaga Ombudsman Daerah DIY resmi didirikan ditandai dengan dilantikannya anggota Lembaga Ombudsman Daerah DIY yang telah terpilih secara demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lembaga Ombudsman Daerah DIY ini merupakan lembaga yang pertama berdiri di daerah di Indonesia. Langkah PUSHAM UII ini kemudian diikuti oleh beberapa daerah lain dengan mendirikan lembaga Ombudsman di daerahnya masing-masing. Lembaga ini dimunculkan sebagai bentuk pembelaan PUSHAM UII terhadap Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya masyarakat. Karena dalam perjalanan bangsa ini, masyarakat masih selalu menjadi obyek dan dalam kondisi inferior dibanding Negara. Lembaga Ombudsman menjadi lembaga yang mengadvokasi hak dan kepentingan masyarakat ketika berhadapan atau dirugikan oleh Negara.

Selain dua program di atas, program Police Reform juga masih menjadi agenda besar di PUSHAM UII. Agenda ini sebenarnya telah dilaksanakan mulai pada tahun 2001 dan hingga kini program ini masih terus berjalan salah satunya dengan program Community Oriented Policing (COP) bekerjasama dengan The Asia Foundation.

Akhirnya selaku direktur mewakili seluruh jajaran pimpinan PUSHAM UII saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Jajaran Rektoriat Universitas Islam Indonesia, para direktur divisi, seluruh staf, sukarelawan yang telah bekerja tanpa lelah demi perkembangan dan kemajuan institusi. Juga kami ucapkan terimakasih kepada Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo Norwegia, The Asia Foundation, USAID, Aus AID dan Partnership for Government Reform in Indonesia atas kepercayaannya bekerjasama dengan kami. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada anggota dewan pakar atas sumbangan pemikiran dan segala bantuannya. Semoga kami bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Suparman Marzuki, S.H., M.Si
Direktur PUSHAM UII

Tentang PUSHAM UII

Sejarah

Latarbelakang pembentukan PUSHAM adalah Kondisi negara Indonesia pada saat itu yang diwarnai pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, pemerintah yang berkuasa banyak memunculkan bentuk-bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial antara masyarakat, semua itu menjadi sebuah keprihatinan mendalam yang dirasakan oleh UII dan kebetulan pada saat itu salah satu program dari Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia adalah untuk mendiseminasi nilai-nilai HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia. Program itulah yang kemudian menjadi titik temu antara keinginan Universitas Islam Indonesia dan Menteri Urusan HAM yang kemudian menghasilkan Memorandum of Understanding (MOU) pendirian Pusat Studi Hak Asasi Manusia.

Pada hari Jum'at, 7 April 2000 ditandatangani Piagam Kerjasama Nomor: MOU.01/meneg./HAM/04/2000 underline 381/B.1/IV/2000 antara Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Rektor Universitas Islam Indonesia.

Untuk menindaklanjuti nota kesepakatan tersebut, Ketua Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor : 9 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia tertanggal 20 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Muhammad Djazman Alkindi dan dilengkapi dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 44/B.6/Rek/IV/2000 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia yang ditandatangani oleh Prof. Zaini Dahlan, MA.

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) merupakan lembaga studi independen yang mengedepankan pertanggungjawaban ilmiah akademik dan netral dari segala kepentingan apapun. Sifat independen dari PUSHAM UII adalah independen penuh yang memiliki hak dan wewenang penuh untuk merencanakan program, personalia pengurus, serta kerjasama-kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Hubungan antara PUSHAM UII dengan birokrasi universitas adalah hubungan koordinatif dan bukan hubungan komando.

Visi dan Misi

Menjadi pusat kajian Hak Asasi Manusia utama, pendidikan dan advokasi dalam membangun dan membentuk pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis dan beradab"

Visi di atas akan direalisasikan dalam dua bentuk yaitu :

1. Misi promosi yang diorientasikan pada penyebaran prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan pelatihan praktis HAM bagi masyarakat publik.
2. Misi penguatan yang ditujukan untuk memungkinkan dan memperkuat negara dan masyarakat dalam menerapkan dan melindungi kebebasan dan hak asasi fundamental.

Daftar Isi

Sambutan	i
Tentang Pusham UEI	iii
Daftar Isi	iv
PROGRAM	
Program Pendirian Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Daerah Istimewa Yogyakarta	1
Program Semiloka Nasional Penyusunan Kurikulum Hak Asasi Manusia	2
Program Penyusunan Buku Ajar HAM dan Training Hukum HAM Bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM	4
Program Community Oriented Policing	5
A. COP Maloboro	6
B. COP Papua	8
COP Pantai Utara: Aranday	8
COP Pantai Selatan: Babo & Fak-fak	9
Seminar Hari HAM	11
Program Bagian Umum	11
Program Insidental	13
Struktur Organisasi	14
Laporan Keuangan	15

Program

PROGRAM PENDIRIAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Indonesia dikenal sebagai negara korup tingkat atas di dunia. Korupsi itu berlangsung mulai dari tingkat bawah di level lokal hingga pusat pemerintahan. Dan meskipun reformasi telah berlangsung di Indonesia sejak 1998, namun tidak menyebabkan kekorupan itu mengecil, bahkan semakin transparan. Reformasi hanya muncul sebagai teriakan para ekibitis LSM, Mahasiswa dan wacana para politikus dan pakar, tetapi tidak dalam bentuk aksi nyata.



Tantangan berat yang dihadapi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagaimana juga dalam pemerintah pusat dan daerah-daerah lain di era sekarang ini, yaitu bagaimana membangun pemerintahan yang demokratis, bersih, taat hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mendorong dan mengkondisikan masyarakat agar siap mengisi "ruang-ruang" sosial, ekonomi, kultural, politik, dan pendidikan sehingga antara pemerintah dan masyarakat bisa bergerak bersama berproses menuju pemerintahan dan masyarakat demokratis, baik, bersih dan dipercaya. Pemerintahan yang korup menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang buruk (ungood governance) dan pelayanan publik yang buruk.

Berawal dari gagasan tersebut, PUSHAM UII telah melakukan sosialisasi pentingnya pemenuhan HAM Ekosok oleh pemerintah sejak tahun 2001. Pada tahun-tahun 2001-2003 sosialisasi dilakukan dengan mengadakan seminar dan pembuatan opini publik melalui media massa. Arah dari sosialisasi HAM Ekosok sejak awal tahun 2001 adalah supaya pemerintah melakukan aksi demi memenuhi hak-hak masyarakat dalam sektor ekonomi, sosial dan budaya.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, PUSHAM UII menawarkan konsep pendirian Lembaga Ombudsman Daerah kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Gagasan tersebut disambut baik oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2004 dan dibuatlah nota kerjasama antara PUSHAM UII dengan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akhir tahun 2004, proses administrasi pelembagaan Ombudsman Daerah dilakukan dan akhirnya pada 8 Juni 2005, diresmikanlah Lembaga Ombudsman Daerah dengan dilantiknya 5 (lima) orang anggota hasil seleksi yang dilakukan oleh PUSHAM UII. Lima orang tersebut antara lain Salman Luthan, S.H., M.H., Budi Santoso, S.H., LL.M., dr. Sunarto, Florensia Switi Andari, S.H., dan Siti Roswabi Handayani, S.H.

Untuk menindak lanjuti pembentukan Lembaga Ombudsman Daerah, disusunlah serangkaian program yang terangkum dalam tema besar Program Penguatan Lembaga Ombudsman Daerah DIY. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PUSHAM UII bekerjasama dengan Partnership for Government Reform in Indonesia mulai pada September 2005 - Agustus 2006.

Deskripsi Kegiatan

Program-program ini dilaksanakan sebagai sarana penguatan kelembagaan sebagai konsekuensi dari pembentukan Lembaga Ombudsman Daerah. Selain itu, Lembaga Ombudsman Daerah DIY merupakan lembaga baru dan lembaga satu-satunya di Indonesia, oleh karenanya kegiatan penguatan ini lebih difokuskan kepada bagaimana Lembaga Ombudsman Daerah dapat eksis dan dikenal luas oleh masyarakat sehingga dapat bekerja dengan optimal.

Secara garis besar kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- Pelatihan keahlian bagi anggota Ombudsman Daerah
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kampanye dan Sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi dalam bentuk seminar dan workshop, penerbitan buletin, pembuatan leaflet, pembuatan poster dan stiker, serta kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik (radio dan televisi).
- Pembuatan buku saku dan blue print Lembaga Ombudsman daerah

Hasil

- Diterimanya keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah oleh kalangan birokrasi pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu ditandai dengan kemauan aparat birokrasi untuk melakukan klarifikasi dan kemauan untuk melakukan kerjasama dengan Lembaga Ombudsman Daerah
- Diterimanya keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah oleh masyarakat luas. Hal itu ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mengadu ke Lembaga Ombudsman Daerah atas berbagai kasus penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh aparat birokrasi.
- Efektifnya aktifitas Lembaga Ombudsman Daerah karena telah mendapatkan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hal ini ditandai dengan banyaknya rekomendasi yang telah dikeluarkan dan banyaknya jumlah kasus yang telah terselesaikan setelah melalui proses penyelesaian di Lembaga Ombudsman Daerah.

PROGRAM SEMILOKA NASIONAL PENYUSUNAN KURIKULUM HAK ASASI MANUSIA

Pendahuluan

Tersingkirnya Orde Baru ditandai dengan jatuhnya Rezim Soeharto pada tahun 1998 telah menandai babak baru pada penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Salah satu tandanya adalah semakin dihormatinya Hak Asasi Manusia sebagai nilai yang melandasi aktifitas kenegaraan. Aksi-aksi untuk mendiseminasikan HAM semakin meluas dan negara juga melakukan upaya pemenuhan dan penghormatan terhadap nilai HAM. Upaya tersebut diwujudkan dengan mencabut berbagai peraturan perundangan yang melanggar HAM serta membuat rencana aksi nasional dalam pemenuhan HAM. Salah satu agenda pemajuan dan perlindungan HAM yang ditetapkan di dalamnya ialah "pendidikan jalur sekolah" yang terdiri dari: 1) menyiapkan kurikulum HAM bagi pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi termasuk pendidikan di lingkungan perguruan agama; 2)



menerjemahkan bahan-bahan pengajaran mengenai HAM; dan 3) pelatihan para guru (juga dosen) di bidang HAM. Rencana Aksi Nasional HAM tersebut tentu saja perlu segera ditindaklanjuti dan diterjemahkan ke dalam agenda-agenda konkrit.

Penetapan mata kuliah HAM sebagai salah satu mata kuliah wajib di tiap-tiap fakultas hukum di Indonesia yang sudah berjalan 3 tahun ini tentu saja menggembirakan, tetapi berdasarkan pengamatan terhadap kurikulum dan bahan pengajaran di beberapa fakultas terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup tajam, bahkan sulit ditangkap apa sesungguhnya yang akan dibangun dengan kurikulum demikian itu. Kenyataan tersebut memerlukan perhatian dan penanganan dari pelbagai kalangan agar materi ajar, metode, sistem evaluasi, kualifikasi pengajar dan buku standar pengajaran bisa dikerangkakan dengan jelas, sehingga produk dari pengajaran HAM bisa lebih optimal.

Bertolak dari gagasan tersebut, PUSHAM UII bekerjasama dengan Norwegian Centre For Human Rights (NCHR), Oslo University telah mengadakan sebuah Lokakarya Nasional dalam rangka penyusunan Kurikulum Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas Se-Indonesia. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada 30 Mei - 2 Juni tahun 2005 di Yogyakarta.

Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari, 2 (dua) hari pertama diadakan seminar dengan mendatangkan para pakar disiplin HAM serta para pakar pendidikan antara lain Dr. Abdul Hakim Garuda Nusantara, Prof. Dr. Nasikun, Dr. Todung Mulya Lubis, Dr. Andang Listyo Binawan, Ildhal Kasim, S.H., M. Habib Chirzin, Prof. Saparinah Sadli, Prof. Muchtar Buchori, Prof. Masyhur Efendi, Artidjo Alkostas, S.H., LL.M., Fajrul Faleh, S.H., M.A., Salam Luthan S.H., M.H.,

Kemudian 2 (dua) hari kedua dilaksanakan diskusi kelompok yang masing-masing mempunyai pokok bahasan yang berbeda untuk menentukan silabi, metode pengajaran dan metode evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh 85 peserta yang terdiri dari dosen Pengajar HAM se Indonesia, utusan PUSHAM di berbagai universitas se-Indonesia, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pusat Studi dan organisasi kemasyarakatan.

Hasil

Dari kegiatan ini dihasilkan beberapa hal yang sangat berarti bagi pengembangan HAM di Indonesia ke depan antara lain :

- Tersusunnya Kurikulum, Kisi-Kisi Materi (Silabi), Metode Pengajaran serta Metode Evaluasi mata Kuliah Hukum HAM
- Terbentuknya jaringan dosen pengajar mata kuliah Hukum dan HAM yang terdokumentasi dengan nama Asosiasi Pengajar Hukum HAM Indonesia disingkat ASPAHAMI
- Tersusunnya kisi-kisi (silabi) buku ajar Hukum HAM bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas se-Indonesia

Tindak Lanjut

Kegiatan Lokakarya ini memunculkan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti antara lain:

- Penyusunan Buku Ajar Hukum HAM bagi Mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas Se-Indonesia
- Penyusunan Buku Suplemen HAM (bunga rampai HAM) untuk melengkapi buku ajar Hukum HAM
- Pelatihan HAM bagi dosen pengajar



PROGRAM PENYUSUNAN BUKU AJAR HAM DAN TRAINING HUKUM HAM BAGI DOSEN PENGAJAR HUKUM DAN HAM

a. Penulisan Buku Ajar HAM dan Buku Bunga Rampai HAM

Workshop penyusunan kurikulum mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia (selanjutnya hukum HAM) yang telah berlangsung pada tanggal 30 Mei hingga 2 Juni 2005 dengan diikuti oleh 50 dosen pengajar hukum HAM pada fakultas hukum negeri dan swasta di Indonesia berlangsung sesuai rencana. Workshop itu telah berhasil: menyusun kurikulum hukum HAM yang akan diajarkan di fakultas hukum di Indonesia; membentuk asosiasi pengajar HAM, menyepakati pembuatan Mailing List, merekomendasikan untuk dibuatkan buku ajar dan buku bacaan hukum HAM.

Kebutuhan akan buku ajar dan buku bacaan hukum HAM ini sangat mendasar karena dalam praktiknya selama ini pengajaran hukum HAM di berbagai fakultas hukum pada universitas-universitas di Indonesia dilakukan secara sporadis dan tidak terukur secara nasional. Hal itu dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain.

- Belum adanya kurikulum hukum HAM yang disepakati oleh semua komponen pengajar hukum HAM dan belum dibuatnya standar pengajaran hukum HAM oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- Tidak adanya buku ajar hukum HAM yang ditulis secara sistematis khusus untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa sesuai dengan kapasitas intelektual dan metode yang tepat bagi pola pengajaran mahasiswa.
- Literatur HAM banyak ditulis oleh para pakar di Indonesia, namun pola penulisannya sangat beragam dan berbasis pada isu-isu HAM tertentu dan tidak komprehensif sehingga akan sangat berat diakses oleh mahasiswa yang baru belajar tentang HAM.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PUSHAM UII bekerjasama dengan Norwegian Centre For Human Rights (NCHR), Oslo University telah dan sedang melakukan program penulisan buku ajar HAM yang dilaksanakan mulai pada 1 Desember 2005 hingga 30 Juni 2006.

Deskripsi Kegiatan

Mahasiswa dianggap sebagai satu kelompok masyarakat yang akan membawa arah perkembangan bangsa. Berpijak pada pemikiran tersebut, maka buku ajar Hukum HAM ditulis dengan serius dan melibatkan para pakar HAM baik dalam maupun luar negeri antara lain Rhona K. M. Smith (Scotlandia), Christian Ranheim (Norwegia), Njal Hostmaeingen (Norwegia), Dr. Rudi M. Rizki, Ildhal Kasim, S.H., LL.M., Agung Yudhawanata, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Andrey Sujatmoko, S.H., M.H., Enny Suprpto, Fadillah Agus, S.H., M.H., dan Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Buku Bunga Rampai

Untuk melengkapi buku Ajar Hukum HAM, disusunlah buku bunga rampai yang isinya adalah sekumpulan tulisan dari para dosen pengajara Hukum HAM se-Indonesia. Secara substantif, buku tersebut ditulis dengan titik tolek pada bagaimana nilai-nilai HAM normatif diwujudkan pada kasus-kasus riil.

b. Training hukum HAM bagi dosen-dosen pengajar hukum HAM

Training hukum HAM bagi dosen-dosen pengajar hukum HAM merupakan rekomendasi dari workshop penyusunan kurikulum yang telah dilakukan sebelumnya. Alasannya, pertama, sebagian besar pengajar

hukum HAM berlatarbelakang pendidikan Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional; sedikit diantaranya yang secara khusus mendalami hukum HAM. Kedua, pengetahuan dan pemahaman pengajar mata kuliah hukum HAM tentang materi hukum HAM masih dangkal, dan bahkan sebagian masih belum dapat membedakan tindakan mana yang dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM dan tindakan mana yang melanggar hukum pidana. Ketiga, diperlukan standar umum pemahaman tentang materi yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Keempat, training adalah jalan pintas yang cepat dan sistematis untuk mentransformasikan materi hukum HAM dari para ahli kepada para pengajar, dan kelima, karena pengajaran hukum HAM bukan sekadar transformasi ilmu pengetahuan, tetapi juga transformasi komitmen kemanusiaan, maka training dinilai sebagai pendekatan yang lebih mampu membangun komitmen dimaksud.

Training ini dilaksanakan oleh PUSHAM UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Oslo University pada 22-24 September 2005.

Deskripsi Kegiatan

Training ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan mengundang 20 (dua puluh) orang peserta. Semua peserta adalah dosen pengajar Hukum HAM pada Fakultas Hukum di berbagai Universitas se-Indonesia. Adapun secara garis besar materi yang disampaikan adalah Pengantar HAM, Hak-Hak Sipil Politik, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum HAM Internasional, Hukum HAM Nasional Indonesia, Pengadilan HAM Indonesia, Mekanisme Monitoring HAM, Hukum Humaniter dan Pengadilan HAM Internasional.

Training ini dilaksanakan dengan mengundang narasumber Internasional dan Nasional antara lain Rhona K. Smith, Njal Hostmaalingen, Christian Ranheim, Rudi M. Rizki, Ifdhal Kasim, Prof. Ramli Atlasasmita, Fadilah Agus, Agung Yudhawirana dan Rafendi Jamin.

PROGRAM COMMUNITY ORIENTED POLICING

Pendahuluan

Community Oriented Policing atau biasa disingkat COP merupakan manifestasi program pengembangan Hak Asasi Manusia di lingkungan kepolisian dengan metodologi dan kapasitas yang dibangun dari polisi dan masyarakat. COP adalah program yang bertujuan mendorong reformasi POLRI sebagai salah satu lembaga penegak hukum dan keadilan di negeri ini. Selama tahun 2005 Pusham UII telah dan menyelenggarakan program COP di kawasan Malioboro yang mencakup Polsek/Kecamatan Danurejan, Gedongtengen dan Gondomanan. Selain di Yogyakarta, COP juga diselenggarakan di kawasan Teluk Bintuni, di Kabupaten Teluk Bintuni dan Fak-fak, Propinsi Papua (Jrian Jaya Barat). Di wilayah ini meliputi 5 Distrik/Polsek: Aranday, Babo, Kokas, Bombaray, Kramamongga.



Performance Polisi akan sangat mempengaruhi iklim HAM di Indonesia, dan karena itu COP yang dikerjakan oleh Pusham UII mengusung misi diseminasi, sosialisasi HAM, baik di kalangan masyarakat dan stakeholder

maupun di internal Polisi yang sejak tahun 2002 menganut prinsip HAM dalam filsafat dan tujuan-tujuan kepolisiannya (UU Polri No. 32 tahun 2002).

Adapun isu pokok HAM yang dijalankan dalam program COP adalah hak atas rasa Aman. Pemenuhan dan penegakan hak atas rasa aman ini, selain merupakan tanggungjawab dan kewajiban aparat Negara, juga sangat perlu disadari dan dimengerti masyarakat. Keamanan tidak saja menyangkut aman dari ancaman tindak pidana kriminal, namun juga meliputi rasa aman dari segala hal yang mengganggu hak hidup, hak sosial, dan hak budaya masyarakat. Sehingga implikasi dari pemenuhan rasa aman ini meliputi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat: agama, budaya, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya.

Oleh karena itu pelaksanaan program COP di Malioboro dan Papua, sangat ditentukan oleh (1) kondisi wilayah dan problem sosial yang spesifik dialami warga (para stakeholder) (2) kualitas dan kemampuan SDM masyarakat dalam merespon dan menyikapi isu-isu dan problem tersebut (3) kondisi dan kualitas aparat pemerintah di wilayah tersebut (4) yang pokok juga adalah situasi, kondisi dan performance organisasi kepolisian baik dari kacamata aparat polisi sendiri maupun dari persepsi dan pengalaman masyarakat dalam berhubungan dengan polisi.

Kualitas dan perkembangan Hak Asasi Manusia (hak atas rasa aman dan hak-hak lain yang bersinggungan langsung dengan problem masyarakat di tiap wilayah) sangat ditentukan oleh konfigurasi dan dinamika dari 4 elemen tersebut. Pusham UII melihat kemajuan dan tantangan yang tidak saja berat, namun juga mencakup aneka permasalahan yang kerap kali di luar jangkauan program-program COP. Sehingga, ekspektasi masyarakat atas Pusham UII, tidak sepenuhnya bisa direalisasikan, namun diyakini sebagai pentahapan yang memerlukan langkah-langkah strategis yang disiapkan secara matang untuk 15-20 tahun yang akan datang.

Langkah-langkah tersebut sebagian telah diagendakan secara pokok dalam program-program dan kegiatan COP di Malioboro Yogyakarta maupun di Papua.

A. COP Malioboro

COP Malioboro dibangun atas dasar visi bahwa masalah keamanan adalah masalah bersama antara masyarakat, polisi dan pemerintah. Visi ini meletakkan nilai-nilai demokrasi secara fundamental khususnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan di Malioboro dan menuntut terciptanya keterbukaan institusi negara serta pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Pada wilayah masyarakat kegiatan-kegiatan COP telah mendorong partisipasi PKL, pengusaha, pengunjung dan masyarakat dalam upaya memelihara keamanan, ketertiban di Malioboro. Sehingga anggota Polsek COP dan relawan melakukan pengorganisir terhadap seluruh anggota dan pengurus Paguyuban dan komunitas di kawasan Malioboro, dalam upaya menjaga keamanan, memelihara ketertiban dan kenyamanan di wilayah Malioboro.

Pada wilayah kepolisian, COP berupaya membantu memperbaiki kinerja Poltabes Yogyakarta, mendorong kinerja aparat kepolisian di internal Polsek Danurejan, Polsek Gondomanan dan Polsek Gedongtengen. Hal lain yang sering dilakukan adalah mendorong adanya akuntabilitas dan mengaktifkan kerjasama antara Polisi, elemen pemerintah dan masyarakat di kawasan Malioboro.

Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi fasilitator dan pendukung, baik pada tingkat kebijakan maupun pada

kegiatan praktis seperti penyadaran, dan penegakan hukum (misalnya, patroli yang dilakukan oleh Dinas Trantib Pemkot Yogyakarta).

Program

Untuk menjalankan misi di atas, sejumlah program dan kegiatan telah dilaksanakan selama Program COP Malioboro dilaksanakan. Program tersebut meliputi Riset, Workshop, Pembentukan Pokja, Sosialisasi COP Malioboro (Pertemuan Masyarakat), Pendidikan Publik, Pengadaan Pos Keamanan Terpadu, Penerbitan Alat Kampanye (komik, stiker, kaos, spanduk, poster), Rekrutmen dan Pengorganisasian relawan, Patroli Keamanan dan Ketertiban, Pembuatan Film Dokumenter.

Out Put :

Out Put Kualitatif

- Meningkatnya kesadaran hukum dan HAM di antara pedagang, pengusaha, becak, parkir dan beberapa elemen lain di kawasan Malioboro. Dampak dari peningkatan ini adalah adanya relasi dan kerjasama yang kuat antara PKL, pengusaha dan masyarakat dalam menata, menertibkan dan menjaga kawasan Malioboro. Civil society Malioboro semakin mandiri dalam proses penataan, penertiban dan pengamanan wilayah Malioboro.
- Peningkatan tersebut terutama sangat terasa pada semakin rapi dan tertatanya jalur lambat (jalur barat) Jl. Malioboro dan Jl. Ahmad Yani dari parkir dan barang dagangan PKL yang selama ini dinilai sebagai sumber kesemrawutan. Upaya penertiban ini dilakukan oleh kalangan Pokja dan para relawan yang berjumlah 63 orang, dari berbagai elemen PKL, pengusaha, becak, parkir dan masyarakat. Pendekatan humanis digunakan dalam melakukan penertiban, dan juga didukung oleh adanya partisipasi dan dukungan masyarakat atas COP Malioboro.
- Melalui berbagai aktivitas bersama antara Polisi Kota Besar Yogyakarta, Dinas Trantib Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Pokja COP Malioboro dan Relawan COP Malioboro, terbangun dialektika, diskusi dan pemahaman yang penting tentang pentingnya kerjasama yang semakin kuat dan efektif antara masyarakat, polisi dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di kawasan Malioboro. Masalah tersebut mencakup masalah keamanan, ketertiban, kebijakan publik dan penguatan 13 organisasi paguyuban yang ada di Malioboro.
- Dengan meningkatnya kerjasama antara PKL, Masyarakat, Parkir, Becak, Pengusaha dan stakeholder lainnya di Malioboro maka dapat meredam berbagai konflik maupun potensi-potensi konflik yang ada. Komunikasi yang terbangun di dalam komunitas Malioboro tersebut menjadi ajang untuk saling mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pihak, dan apabila kepentingan dari pihak-pihak tersebut ada yang saling bertabrakan maka mereka mencoba untuk mengurai dan mencari solusi yang saling menguntungkan di antara mereka.
- Selain dengan terkonsolidasinya organisasi-organisasi paguyuban, Pokja dan relawan dalam melaksanakan program COP, dirasa perlu institusionalisasi COP Malioboro melalui kebijakan Perda COP, oleh pemerintah dan DPRD Kotamadya Yogyakarta. Selain itu, dirasa perlu terbentuknya suatu sistem dan mekanisme dukungan dan kontrol atas kinerja dan institusi Poltabes Yogyakarta.
- Mulai terbangun pemahaman bahwa soal keamanan bukan soal kriminal tetapi juga bisa berupa gangguan sosial.

Output Kuantitatif

- Berbagai alat kampanye dan sosialisasi COP Malioboro, telah dibuat dan disebarluaskan ke semua kalangan di wilayah Malioboro, pemerintah dan kepolisian. Spanduk 50 ex, liflet dan brosur sebanyak 2000 ex, kaos 250 buah, buletin berbentuk komik sebanyak 6 edisi masing-masing 1000 ex, terutama baru

menjangkau kalangan PKL, parkir, becak dan pengusaha. Distribusi dilakukan oleh Pokja dan relawan.

- b) Kegiatan pendidikan publik dan pertemuan masyarakat dilakukan dengan melibatkan ± 60 peserta, sedikitnya peserta dibandingkan jumlah komunitas terjadi karena tingkat kesibukan PKL, pengusaha dan masyarakat yang sangat tinggi dan sebagian besar dari mereka bekerja penuh waktu.
- c) Keterlibatan perempuan cukup menonjol pada berbagai pertemuan masyarakat dan pendidikan publik yang mengangkat tema "Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan". Namun dalam komposisi pokja, ada 2 orang perempuan dan di kalangan relawan didominasi oleh laki-laki karena aktivitas mereka berpatroli di lapangan.

B. COP Papua

COP pulau Papua di leher Pulau Cendrawasih, mencakup dua kawasan pantai yang membentuk kawasan Teluk Bintuni, yakni Pantai Utara di Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, dan kawasan Pantai Selatan di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, dan 4 distrik di Kabupaten Fak-fak, yakni Kokas, Ubaderi, Kramomonga dan Bomberai.

Selama tahun 2005, kegiatan tersebut dibagi dalam 2 program, yakni COP Pantai Utara Aranday serta COP Pantai Selatan di Babo dan Fak-fak. Program COP di Teluk Bintuni dan Fak-fak dimulai dengan training COP di Yogyakarta, dengan peserta dari "leher Cendrawasih".

COP Pantai Utara: Aranday

Program COP di Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni diawali dengan training COP pada 25-28 Mei 2005 yang diselenggarakan di Yogya, dengan melibatkan 23 peserta dari kepala-kepala kampung, LMA, BPJLMAS, distrik dan Kapolsek. Dari hasil training ini diusulkan oleh para peserta untuk diadakan kegiatan COP di distrik yang menjadi salah satu kawasan eksplorasi minyak perusahaan MNC (Multi National Corporation), British Petroleum.

Program	Hasil	Keterangan
Sosialisasi COP	A. Adanya pemahaman masyarakat tentang arti dan pentingnya COP bagi masyarakat B. Terbentuknya Pokja COP di 12 kampung Distrik Aranday (Pantai Utara) yang berjumlah 65 orang C. Berdirinya Posko COP di kampung Manunggal Karya, Aranday dan Kecap	Dilakukan oleh Tim I Pusham UII bersama Kapolsek, Distrik, ketua LMA dan BPJLMAS
Pelatihan dan Training COP untuk Pokja	A. Adanya pemahaman yang lebih dalam akan arti dan cara melakukan kegiatan COP oleh Pokja COP B. Adanya rumusan Kode Etik Pokja dalam kegiatan COP	Pelatihan dipusatkan di ibu kota distrik Aranday, kampung Sebyar Rejosari
Perencanaan Program	A. Adanya rumusan perencanaan program COP yang akan dilaksanakan tahun 2006 yang mencakup bidang Keamanan dan Pendidikan untuk pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya. B. Pembukaan kelas pemberantasan buta huruf di kampung Iria	Perencanaan dilakukan bersama anggota Pokja, aparat kampung dan beberapa warga

Ketiga program Pokok di atas dilakukan secara bertahap:

Program I oleh Tim I Pusham UII pada 23 Juni s.d 23 Juli 2005

Program II, oleh Tim II Pusham UII, pada 23 Juli s.d. 23 Agustus 2005

Program III, oleh Tim III Pusham UII, pada 23 Agustus s.d. 23 September 2005

Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dan menyebar di 12 kampung distrik Aranday, yakni Kalitami I, Kalitami II, Weriagar, Mogotira, Taroy, Sebyar Rejosari, Tomu, Ekam, Manunggal Karya, Kecap, Aranday dan kampung Baru Ijira.

COP Pantai Selatan: Babo dan Fak-fak

COP Babo

Sama dengan proses pelaksanaan COP di Aranday, COP Babo juga diawali dengan training COP yang diadakan di Yogyakarta, 12-15 September 2005. Training ini mendatangkan peserta asal Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni yang terdiri atas kepala kampung, LMA, distrik dan Polsek Babo. Hasil dari training adalah pelaksanaan program COP di wilayah distrik Babo, yang menjadi pusat kegiatan BP dalam eksploitasi gas dan minyak di kawasan Teluk Bintuni.

Berbeda dengan strategi COP Aranday, Kegiatan COP 2005 di Babo dilaksanakan oleh sebuah Tim yang langsung melakukan kegiatan sosialisasi, pembentukan Pokja dan Perencanaan Program bersama masyarakat setempat di 6 kampung: Iranutu III, Sidomakmur, Saengga, Tanah Merah dan Onar.

Program	Hasil	Keterangan
Sosialisasi COP	A. Adanya pemahaman masyarakat tentang arti dan pentingnya COP bagi masyarakat B. Terbentuknya Pokja COP di 6 kampung Distrik Babo (Pantai Selatan) yang berjumlah 31 orang C. Berdirinya Posko COP di kampung Tanah Merah, Saengga, Sidomakmur (RKI), dan Iranutu III	Dilakukan oleh Tim Pusham UII bersama Kapolsek, Distrik, ketua LMA dan BPSLMA
Pelatihan dan Training COP untuk Pokja	A. Adanya pemahaman yang lebih dalam akan arti dan cara melakukan kegiatan COP oleh Pokja COP B. Adanya rumusan Kode Etik Pokja dalam kegiatan COP	Pelatihan dipusatkan di masing-masing kampung.
Perencanaan Program	Adanya rumusan perencanaan program COP yang akan dilaksanakan tahun 2006 yang mencakup bidang Kesamanan, Kesehatan dan Pendidikan untuk pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Perencanaan dilakukan bersama anggota Pokja, aparat kampung dan beberapa warga

COP Fak-fak

Fak-fak merupakan kabupaten sendiri yang terpisah dari Kabupaten Teluk Bintuni. Hal ini memperluas skala kegiatan COP di kawasan Teluk Bintuni. Sehingga sebuah Tim Pusham UII juga dikirimkan secara khusus untuk membangun program COP di wilayah Fak-fak, yang hanya mencakup 3 Distrik: Kokas, Bombaray, Kramamongga. Dari ketiga distrik itu, kampung-kampung yang menjadi sasaran program COP adalah Kelurahan Kokas Kota (distrik Kokas), kampung Toeri, Tomage (Distrik Bombaray), kampung Ubadari, Goras dan Kaburbur (distrik Kramamongga).

COP Fak-fak, juga dimulai dengan training COP di Yogyakarta yang waktu dan materi trainingnya bersamaan dengan para peserta dari Distrik Babo, yakni pada 12 - 25 September 2005. Latarbelakang peserta pun sama:

kepala kampung, LMA, kepala suku, distrik dan Polsek. Pola yang digunakan untuk tahap awal kegiatan COP, sama dengan COP di Babo, dimana dalam tahun 2005, yakni antara 11 November - 15 Desember 2005, melakukan kegiatan Sosialisasi, Pembentukan Pokja dan Perencanaan Program.

Program	Hasil	Keterangan
Sosialisasi COP	A. Adanya pemahaman masyarakat tentang arti dan pentingnya COP bagi masyarakat B. Terbentuknya Pokja COP di 6 kampung di 3 Distrik Kabupaten Fak-fak, di kawasan Pantai Selatan Teluk Bintuni yang berjumlah 30 orang C. Berdirinya Posko COP di kampung Ubedari.	Dilakukan oleh Tim Pusham UII bersama Kapolsek, Distrik, ketua LMA dan BP3LNAS
Pelatihan dan Training COP untuk Pokja	A. Adanya pemahaman yang lebih dalam akan arti dan cara melakukan kegiatan COP oleh Pokja COP B. Adanya rumusan Kode Etik Pokja dalam kegiatan COP	Pelatihan dipusatkan Toeni, Tomage dan di Kelurahan Kokas Kota.
Perencanaan Program	Adanya rumusan perencanaan program COP yang akan dilaksanakan tahun 2006 yang mencakup bidang Keamanan, Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan untuk pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Perencanaan dilakukan bersama anggota Pokja, aparat kampung dan beberapa warga

Signifikansi COP Papua

Kegiatan COP di kawasan leher burung Cendrawasih Papua, di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fak-fak sangat lah penting bagi Pusham UII, dilihat dari konteks permasalahan dan pihak-pihak yang berkepentingan di kawasan tersebut. Permasalahan tersebut, terutama akan mendatangkan problem pemenuhan dan penegakan Hak-hak Masyarakat Adat (*indigenous people rights*) dalam bidang HAM Ekosob maupun HAM Sipil dan Politik. Adapun pihak yang sangat berkepentingan adalah "si bunga Mawar" British Petroleum. Tidak heran, pihak BP menjadi aktor yang sangat dominan dan berkuasa, ketika birokrasi, baik di Papua sendiri maupun di Kabupaten Teluk Bintuni dan Fak-fak tidak stabil.

Lemahnya posisi negara tentu saja akan berimplikasi buruk kepada masyarakat adat. Implikasi yang antara lain sudah terlihat oleh Pusham UII adalah: pertama, kecenderungan masyarakat melihat BP sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam bidang *public service*. Padahal tanggungjawab ini sepenuhnya merupakan tugas pemerintah nasional Indonesia dan segenap aparaturinya di wilayah eksplorasi BP. Kedua, muncul aktor-aktor dan tokoh-tokoh lokal yang memanfaatkan situasi "ketidakstabilan" negara dan "kue besar" BP dengan cara-cara yang tidak etis, seperti meminta dana dalam jumlah besar untuk kepentingan pribadi yang mengorbankan kepentingan mendasar masyarakat adat. Ketiga, tidak tersalurkannya kepentingan masyarakat secara legal dan etis serta terabaikannya hak-hak mereka. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai tindakan "main hakim sendiri" seperti pembajakan speedboat BP oleh masyarakat. Bila situasi ini tidak dikendalikan, maka dapat berakibat lebih buruk kepada masyarakat sendiri, berupa represi modal dan militer dan penindasan HAM, seperti yang sudah umum terjadi di wilayah lain Papua.

COP menjadi mediasi bagi pemerintah, polisi, masyarakat adat dan juga pihak BP dalam menciptakan kondisi keamanan, sosial, ekonomi dan politik yang memadai bagi terpenuhinya keadilan dan tegaknya HAM secara bertahap. Pusham UII, pihak kepolisian, birokrasi, masyarakat adat dan BP sedang dalam proses menuju

tahap yang ideal bagi kondisi Hak Asasi Manusia di wilayah Teluk Bintuni, di 2 distrik Kabupaten Teluk Bintuni dan 4 distrik Kabupaten Fak-fak.

Tahun 2006 merupakan tahun yang akan menguji dan mempraktekkan secara langsung bagaimana program COP berlangsung: apakah sukses atau tidak?

SEMINAR HARI HAM

Dalam rangka peringatan hari HAM yang jatuh pada 10 Desember 2005, Pusham UII dan 10 jaringan komunitas yang ada di Yogyakarta dan Jakarta menyelenggarakan seminar dengan tema "Diskriminasi dan Rekonsiliasi Korban (Pelanggaran HAM) Masa Lalu". Seminar ini telah dilaksanakan pada 10 Desember 2005, jam 09.00 sampai 12.30 WIB, di Ruang Kuliah II/9 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jalan Taman Siswa Yogyakarta.

Tempi sebagai pembicara adalah Ildhal Kasim, S.H. Direktur Elsam Jakarta, Budi Santoso, S.H. LL.M dari Lembaga Omdusman Daerah Yogyakarta, dan Muyono, S.H, salah seorang anggota Tim Advokasi Nasional dari korban-korban peristiwa 65/66.

Adapun jaringan yang ikut serta dalam seminar ini adalah Elsam Jakarta, Pusdep Universitas Sanata Dharma, Syarikat, Fopperham, LPKRAB, HMI Cabang Yogyakarta, HMI MPO Cabang Yogyakarta, LPM Keadilan Fakultas Hukum UII, DPM UII dan Resist Book. Para peserta yang hadir berasal dari berbagai organisasi mahasiswa, dosen, peneliti, tokoh masyarakat, dan korban peristiwa 65/66.

Dari seminar ini telah dihasilkan beberapa kesimpulan :

- Pentingnya gerakan sosial dan peran para intelektual untuk mendorong KKR yang tidak terjebak pada skenario dan kepentingan militer dan mantan tokoh-tokoh orde baru.
- Mendorong Lembaga Omdusman Daerah melakukan langkah-langkah strategis dan ideologis untuk merubah ideologi dan watak birokrasi sipil.
- Adanya wacana dan perbincangan tentang KKR dan Komisi Omdusman di kalangan civitas akademika di universitas-universitas di Yogya, dan juga di kalangan organisasi sipil dan aktivis pergerakan.
- Perlu langkah-langkah strategis dan taktis yang dibangun secara permanen, dalam rangka menumbuhkan solidaritas atas korban-korban Orde Baru, yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis untuk mendorong KKR dan Komisi Omdusman yang berpihak pada korban masa lalu.

PROGRAM BAGIAN UMUM

Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan bagian umum ini lebih banyak diisi dengan perawatan barang-barang inventaris kantor dan penambahan koleksi buku serta inventaris lain. Untuk menunjang berbagai aktifitas kelembagaan, PUSHAM UII menyewa satu buah gedung dengan 8 kamar ditambah dengan ruang tamu, ruang rapat, ruang perpustakaan, serta dapur dengan seluruh perlengkapan pendukung seperti 6 unit komputer lengkap, 2 unit *tap top*, 2 *Overhead Projector* (OHP), 2 buah layar *Overhead Projector* (OHP), 1 buah *LCD Projector*, 1 buah *Video Cassette Player*, 1 buah televisi 21", 2 buah kamera foto, 1 buah kamera video, 1 buah *handycam*, 1 buah *scanner*, 2 buah *tape recorder*, 1 buah *Microphone* dan *wireless*, 1 buah mesin fax, 6 buah telepon serta perlengkapan rumah seperti mebelor dan *Air Conditioner*.

Selain itu, PUSHAM UII telah mempunyai koleksi buku yang relatif memadai yang dikelola secara khusus oleh seorang pustakawan. Buku tersebut terdiri dari 875 judul dengan jumlah 1000 eksemplar.

Selain dari beberapa program di atas, PUSHAM UII telah menerbitkan beberapa alat kampanye antara lain buletin, *newsletter*, komik, kaos dan buku. Khusus untuk buku beberapa judulnya antara lain

1. Negara tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan,
oleh: Artidjo Alkostar
2. Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih,
oleh: Eko Prasetyo, Fibria Agustina & Suparman Marzuki
3. Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban (2 versi),
oleh: Artidjo Alkostar
4. Peran Polisi dalam Konflik Sosial Politik di Indonesia (2 versi)
oleh: Eko Prasetyo dkk
5. SelamatJalan Sang Pemimpin. Mengungkap Tabir Kematian Tokoh Papua Theys Hiyu Eluay
oleh: Frits Ramandey dkk

Program Insidental

Sebagai lembaga studi Hak Asasi Manusia, kami juga melakukan serangkaian kegiatan yang bermuara training dan advokasi. Training ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan tentang tema-tema HAM, tema-tema advokasi kebijakan publik serta advokasi kebijakan pendidikan.

Salah satu kelompok yang menjadi sasaran training adalah mahasiswa, hal ini didasari oleh fakta bahwa proses kapitalisasi dan komersialisasi lembaga pendidikan semakin kencang dengan mengabaikan keresahan dan aspirasi publik, orang tua dan mahasiswa. Kebijakan ini berlangsung secara massif dengan sejumlah peraturan dan perundang-undangan, yang melibatkan aktor nasional maupun lokal di tingkat universitas. Kebijakan pendidikan nasional dirasa telah melanggar asas tanggungjawab negara dalam sektor pelayanan publik, yakni pendidikan. Untuk itu lah PUSHAM UII bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di beberapa Universitas di Yogyakarta antara lain BEM Universitas Negeri Yogyakarta dan BEM Universitas Gajah Mada mengadakan training bagi mahasiswa untuk melakukan langkah-langkah advokasi dalam bidang pendidikan.

Target dari training ini adalah:

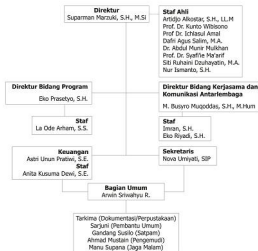
- Mahasiswa memahami dan menyadari secara kritis segala bentuk kebijakan pendidikan

- Mahasiswa mampu mengambil langkah-langkah advokasi atas kebijakan yang dipandang menyimpang dan tidak demokratis

- Mahasiswa menyadari konteks kebijakan pendidikan nasional-universitas dan mampu melakukan advokasi baik untuk kepentingan mahasiswa maupun publik

Secara praksis, PUSHAM UII juga aktif dalam rangka melakukan advokasi terhadap masyarakat yang menjadi korban kebijakan pemerintah, antara lain korban pengusuran, Pedagang Kaki Lima, dan masyarakat korban pembuatan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Dalam prakteknya, seringkali kebijakan pemerintah baik dalam kasus pengusuran maupun pembangunan jaringan sutet adalah demi memenuhi kepentingan sekelompok masyarakat yang lebih besar dan akhirnya banyak masyarakat yang menjadi korban. Dalam kasus ini hak ekosob masyarakat yang sering terinjak-injak oleh kepentingan negara yang sebenarnya merupakan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki modal besar.

Struktur Organisasi

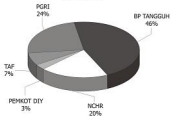


Laporan Keuangan

Distribusi Sumber Dana Program Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia Tahun 2005

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	Sub Total	% asse
1.	Training COP Untuk Masyarakat Pantai Selatan (Distrik Aranday), Papua	BP LNG TANGGUH	394,818,000	1,435,878,000	45.70%
	Sosialisasi Program Community Oriented Policing di Distrik Aranday Papua		390,270,000		
	Rapat Koordinasi Program Promosi HAM di Papua		104,930,000		
	Sosialisasi Community Oriented Policing di Daerah Pantai Utara Papua (Babo & Fak-Fak)		545,860,000		
2.	Seminar dan Lokakarya Nasional Penyusunan Kurikulum HAM	NCHR	322,498,000	622,498,000	19.81%
	Peremuan Terbatas Pembuatan Buku Ajar & Training Hukum dan Ham untuk Dosen Pengajar		300,000,000		
3.	Community Oriented Policing di Kawasan MALJOBORO Yogyakarta	PEMKOT DIY	101,643,100	101,643,100	3.23%
		TAF	221,476,500	221,476,500	7.05%
4.	Penguatan Lembaga Ombudsman Daerah dan Lembaga Ombudsman Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta	PGRI	760,715,000	760,715,000	24.21%
Total			3,142,210,600	3,142,210,600	100.00%

Prosentase Distribusi Sumber Dana Program Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia Tahun 2005



**Pengelolaan Dana Proyek/Program Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia
Tahun 2005**

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	% ase	Jangka Waktu
1.	Training COP Untuk Masyarakat Pantai Selatan (Distrik Aranday), Papua	BP LNG TANGGUH	394,818,000	12.56%	September 2005
2.	Sosialisasi Program Community Oriented Policing di Distrik Aranday PAPUA		390,270,000	12.42%	1 Juli - 30 September 2005
3.	Rapat Koordinasi Program Promosi HAM di Papua		104,930,000	3.34%	Oktober 2005
4.	Sosialisasi Community Oriented Policing di Daerah Pantai Utara Papua (Babo & Fek-Fek)		545,860,000	17.37%	1 Oktober - 31 Desember 2005
5.	Seminar dan Lokakarya Nasional Penyusunan Kurikulum HAM	NCHR	322,498,000	10.26%	Mai - Juni 2005
6.	Pertemuan Terbatas Pembuatan Buku Ajar & Training Hukum dan Ham untuk Dosen Pengajar		300,000,000	9.55%	September 2005
7.	Community Oriented Policing di Kawasan MALJOBORO Yogyakarta	PEMKOT DIY	323,119,600	10.28%	1 Januari - 15 Nopember 2005
		TAF			
8.	Penguatan Lembaga Ombudsman Daerah dan Lembaga Ombudsman Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta	PGRJ	760,715,000	24.21%	1 September 2005 - 31 Agustus 2006
	Total		3,142,210,600	100.00%	

**Prosentase Pengelolaan Dana Proyek/Program
Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia
Tahun 2005**

